

PENGEMBANGAN NASIONALISME DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ACEH YANG MENJALANKAN SYARIAT ISLAM

Sulaiman, Nurmasiyah

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah

Email : sulaiman@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

The people of Aceh, in its history until now. considered a strong adherent of Islam. Islam has not only been strived to be upheld in the midst of society in terms of the implementation of its teachings, this religion has also become the main foundation in the formation of nationalist attitudes, the tradition of the royal court in the past is full of Islamic values, since the title used, the concept of governance , court ceremonial traditions (which do not differentiate between Islamic and royal traditions). and various royal religious policies, especially in the 17th century. Islam was not only an inspiration for development and progress in Aceh in various fields, it also played a major role in the strong resistance against the Portuguese in Malacca. in the first half of the 16th century, and the Netherlands, in the late 19th and early 20th centuries. This war in the name of religion has always been held closely by the community consistently.

Keywords : Nationalism, Islam Syariat

Pendahuluan

Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (warga masyarakat). Ikatan ini terjadi dan tumbuh di tengah masyarakat saat manusia (warga masyarakat) mulai memikirkan hidup bersama dalam satu wilayah tertentu, ialah negara yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain.

Perlu dipahami bahwa semula yang namanya Indonesia itu, terdapat berbagai suku bangsa yang mendiami kawasan dalam lingkungan pulau-pulau. Masing-masing pulau terisolasi satu dari yang lain karena factor alamiah, sehingga mengakibatkan hubungan antar pulau menjadi tidak mudah. Kondisi ini mendorong tumbuhnya ciri

kesukuan, kebahasaan, kebudayaan yang terpisah-pisah yang masing-masing berbeda, sehingga memunculkan sifat khas masing-masing menurut lingkungannya.

Dalam kondisi yang berbeda-beda itu, nasionalisme masyarakat Aceh tumbuh ditandai adanya perasaan kebangsaan dan kesamaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajah maupun bentuk penolakan lainnya. Dalam arti timbulnya reaksi masyarakat Aceh terhadap sikap dan tindakan penjajah. Dalam hal inilah penjajah mulai merasakan adanya penolakan dari rakyat Aceh, yang ditandai terjadinya pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Aceh. Pemberontakan-pemberontakan itu secara politis untuk melepaskan diri dari penjajah, mengusir penjajah dari bumi Aceh.

Penerapan syariat Islam di Aceh telah mampu menyelesaikan masalah baru yaitu meningkatnya rasa nasionalisme sesama anak bangsa. Arus masalah tersebut dapat menciptakan identitas nasionalisme masyarakat Aceh. Kalau kita perhatikan dewasa ini jika ditinjau dari segi sikap nasionalisme (sebagai elemen penting dalam penumbuhan nasionalisme), kita banyak mengalami perubahan kearah lebih baik.

Jiwa Nasionalisme sangat penting untuk dimiliki setiap individu terutama oleh masyarakat dan generasi muda Aceh. Namun, ada anggapan yang mengatakan generasi muda Aceh tidak memiliki jiwa nasionalisme. Bahkan ada pula yang mengatakan jiwa nasionalisme itu ada. Hanya saja tidak ada pemicu yang dapat membuat jiwa nasionalisme itu tampak. Berbagai cara harus dilakukan untuk memicu jiwa nasionalisme dalam diri generasi muda Aceh.

Syariat Islam sebagai solusi dalam membentuk nasionalisme masyarakat Aceh, karena dalam syariat islam kita dituntut untuk berbuat baik dengan sesama tanpa pandang bulu dan mengajarkan kecintaan terhadap tanah air.

Pembahasan

a. Nasionalisme dalam Perspektif Islam

Islam bagi pemeluknya bukan saja menjadi agama dalam pengertian studi Barat namun ia juga sistem yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam bukunya, Marcel Boisard (1980:183) menilai bahwa universalitas Islam sebagai agama dan sistem sosial dapat dibuktikan dari empat segi: segi metafisik,

segi agama, segi sosiologis, dan segi politik. Sebagai keimanan terhadap keesaan Tuhan yang dituangkan dalam keyakinan yang sangat kuat, Islam adalah ideologi universal yang tidak bisa disamakan dengan ideologi dan agama apapun. Di samping aspek fundamental ini, konsepsi Islam tentang manusia membantu kepada universalitas manusia. Manusia adalah makhluk merdeka dan bertanggung jawab. Namun, dia tidak terpengaruh karena dia hidup di lingkungan sosial dan dia akan menerima akibat dari setiap perbuatannya. Konsepsi ganda Islam tentang individu sesuai dengan konsep universalitas yang diterima oleh filsafat Barat modern. Islam juga mengajarkan universalitas moral. Merupakan fakta yang tidak diragukan bahwa ajaran Islam dapat memasuki dan berkembang di daerah geografis dan lingkungan kultural yang berbeda-beda. Wahyu ilahi ditujukan kepada semua manusia agar mereka memeluk Islam dan ditujukan pada tingkat lain secara khusus kepada kaum beriman untuk mematuhi aturan-aturannya. Mematuhi ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. berarti memutuskan hubungan dengan orde sosial kesukuan dan mengidentifikasi dirinya dengan kesatuan baru (Dault, 2005:160). Namun afiliasi dan loyalitas kepada komunitas yang berdasarkan keimanan tidak berarti bahwa Islam melarang ikatan-ikatan lain selain ikatan berdasar keimanan. Alih-alih, Islam menganjurkan bentuk-bentuk ikatan lain, seperti ikatan keluarga, selama tidak bertentangan dengan Islam (Umari dalam Dault, 2005:162).

Studi tentang hubungan Islam dan nasionalisme bermula dari kawasan Timur Tengah. Seperti di Indonesia, sejumlah pelajar Timur Tengah yang belajar di Eropa kembali dengan membawa konsep nasionalisme yang dipelajari di Barat. Konsep Barat tentang patrian (tanah air) memengaruhi kata wathan dalam bahasa Arab dengan memberi pengertian politik padanya. Mereka percaya bahwa kemajuan yang dicapai Eropa dipengaruhi oleh kuatnya patriotisme individu dan masyarakat terhadap negara. Hal ini tergambar dari pernyataan Al-Tahtawi, seorang teoritis nasionalisme Arab berpengaruh, bahwa “Patriotisme adalah sumber kemajuan dan kekuatan, sarana untuk mengatasi jarak antara wilayah Islam dengan Eropa” (Azra dalam Dault, 2005:186). Perkembangan pemikiran nasionalisme sekuler berdampak pada tatanan politik umat Islam. Bentuk negara bangsa yang diadopsi dari Barat dijadikan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah dalam pergaulan

internasional. Kenyataan ini berdampak pada terpecah-belahnya dunia Islam menjadi banyak negara bangsa yang tidak lagi berdasar pada ajaran Islam yang baku. Basis material negara bangsa yang hanya berpatok pada etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah dan mengabaikan kategori religius (keimanan).

Absennya keimanan dari rumusan nasionalisme menimbulkan kritik dari sebagian tokoh Islam. Mereka meyakini bahwa hal ini menyebabkan lemahnya kesatuan dunia Islam. Ali Muhammad Naqvi, misalnya, menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan nasionalisme karena keduanya berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagai basis bangunan komunitas ditolak Al-Quran, karena ia hanya bersifat nasional lokal sementara Islam mempunyai tujuan universal. Alasan lain adalah spirit sekuler dalam nasionalisme yang menghendaki pemisahan tegas antara agama dan politik (Naqvi dalam Dault, 2005:188).

Kritik yang dilontarkan memosisikan Islam vis a vis nasionalisme. Namun dalam konteks Indonesia, sila-sila dalam Pancasila sebagai ideologi Negara tidak satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Kuntowijoyo (1997:85) berpendapat bahwa Pancasila adalah obyektifikasi Islam. Meskipun dia mengingatkan bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Bagi Kunto, ideologi dan agama dibedakan berdasarkan motif. Ideologi tanpa agama dapat berjalan karena dalam diri manusia terdapat apa yang disebut Immanuel Kant sebagai categorical imperative, seperti nilai-nilai disiplin, setia kawan, kedermawanan, dan nilai etika yang lain. Dalam agama terdapat sistem dosa pahala, surga neraka, dan halal haram yang semuanya berdasar keimanan dan kemudian menggiring seseorang untuk bertindak sesuai dengan kategori-kategori yang dia yakini. Categorical imperative sebagai sistem sekuler juga memiliki sanksi yang bersifat personal, berupa rasa bersalah, dan sanksi institusional yang terwujud dalam hukum formal.

Pancasila menggabungkan konsep tentang kekuasaan (ketuhanan dan kedaulatan rakyat), konsep tentang proses (kemanusiaan dan kebangsaan), dan konsep tentang tujuan (keadilan sosial). Keunikan Pancasila adalah bahwa kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat teodemokrasi. Istilah ini tersusun dari dua istilah: teokrasi dan demokrasi. Teokrasi (teosentrisme) dengan menghilangkan konotasi negatif ala Barat bagi umat Islam sama dengan istilah tauhid, yaitu

menjadikan Tuhan sebagai pusat. Ini berarti bahwa kekuasaan Tuhan ada di atas kekuasaan negara. Dalam pelaksanaannya kekuasaan dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip agama, seperti syura dan keadilan. Sementara demokrasi adalah sistem kekuasaan dengan kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, tanpa harus terikat pada hukum-hukum Tuhan. Dengan demikian, teodemokrasi adalah konsep tentang kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum Tuhan di satu sisi dan oleh rakyat di sisi lain. Dapat pula dirumuskan bahwa ia adalah kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dengan keyakinan bahwa sumber kekuasaan adalah Tuhan. Sebelum konsep demokrasi dikenal, tanggung jawab kekuasaan dilaksanakan hanya kepada Tuhan, sehingga sering disalahgunakan. Dalam sejarah Jawa misalnya, seorang raja memakai gelar khalifatullah dan dalam sistem kesadaran rakyat kekuasaan raja dianggap sebagai kekuasaan Tuhan yang tidak bisa di ganggu gugat. Hal ini yang kemudian memberi konotasi negatif terhadap sistem teokrasi dalam kajian politik di Barat (Kuntowijoyo, 1997:62, Burhan dan Muhammad (2001: 29).

Nasionalisme Indonesia yang berbentuk negara-bangsa dan menggunakan demokrasi sebagai sistem politik tidak bertentangan dengan Islam sepanjang ia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam agama. Abul A'la Maududi (2004:54) menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak dan kekuasaan sebagai khalifah Allah dan dalam hal ini semua individu adalah sama. Institusi yang menangani urusan negara dibentuk sesuai dengan kehendak individu-individu dalam masyarakat. Pendapat mereka menentukan bentuk, pemimpin, dan segala sesuatu yang terkait dengan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, sistem politik Islam merupakan demokrasi yang sebenarnya.

b. Islam sebagai perekat nasionalisme Masyarakat Aceh

Islam menjadi pilar utama dalam terwujudnya ukhuwwah Islamiyah di kerajaan ini di masa lampau. Tema ini menjadi demikian populer di Aceh. sehingga masyarakat Islam dari berbagai kawasan. seperti Arabia, Turki, India, dan Persia, banyak ditemukan di kerajaan ini. baik untuk tujuan dagang, mengajar Islam, bahkan menetap di sini untuk selamanya. Oleh karena itulah, C. Snouck Hurgronje di penghujung abad ke 19 menginformasikan bahwa

banyak masyarakat Arab yang menetap di Aceh, terutama dari keturunan Nabi yang bergelar habib dan sayyid. Mereka sangat dihargai oleh masyarakat, bukan saja karena status keulamaan yang mereka sandang, akan tetapi juga karena garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang mereka miliki. Hubungan baik dengan Turki juga terjalin secara resmi pada pertengahan abad ke-16, di saat mana Aceh sedang gencar-gencar melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Terlepas dari kepentingan politik dan dagang yang mereka miliki ketika itu, unsur Islam memainkan peran yang fundamental, terutama ketika berhadapan dengan Portugis, yang secara terus menerus menjadi ancaman terhadap Islam, baik di Laut Merah maupun di Lautan Hindia. Bahkan, bangsa Eropa ini, yang melakukan petualangan di seluruh penjuru dunia atas nama kepentingan dagang dan kristenisasi serta juga melanjutkan semangatperang Salib, hampir saja berhasil menduduki Mekah. Adalah atas nama Islam juga, Turki senantiasa memberikan perhatiannya ke pada Aceh, sehingga mereka terlibat dalam banyak peperangan yang dilakukan Aceh, terutama dalam memberikan bantuan senjata dan penasihat militer. Bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya menetap di kerajaan ini.

Tidak hanya pada tingkat bawah dan menengah Islam telah memainkan perannya sebagai perekat antar etnik di nusantara. Pada tingkatan tertinggi sekalipun Aceh memiliki toleransi yang besar terhadap etnik lain atas nama Islam. Bila dalam sistem pemerintahan yang tradisional (kerajaan) kekuasaan tertinggi hanya dapat diberikan kepada keluarga kerajaan (royal family), maka hal ini tidak selalu terjadi di Aceh. Kerajaan ini juga pernah memberikan kekuasaan tertinggi kepada orang luar. Di antara tahun 1579-1586, Aceh diperintah oleh Sultan 'Ala' al-Din, anak Mansur Shah dari Perak. Antara tahun 1586-1589, seorang warga luar Aceh yang lain, yaitu 'Ala' al-Din Ri'ayat Shah, anak Munawwar Shah dari Indera Pura (Sumatra Barat), juga memimpin Aceh. Iskandar Thani, yang memerintah antara tahun 1636-1641, sebenarnya adalah anak Sultan Ahmad X dari Pahang, meskipun ia menantu Iskandar Muda. Pada abad ke-18 Aceh juga pernah dipimpin oleh keturunan Arab dan bahkan Bugis.

Barangkali menarik di sini mengutip sedikit cerita yang terdapat di dalam sebuah karya tradisional abad ke-17 yang dikenal dengan Hikayat Malem Dagang. Kerajaan Aceh yang berada di bawah kepemimpinan Iskandar Muda diceritakan berada dalam keadaan aman dan sejahtera, sampai dengan kedatangan dua anggota keluarga kerajaan dari Pahang, yaitu Raja Raden dan saudara perempuannya yang bernama PutriPahang. Kedua mereka diterima

oleh Iskandar Muda dengan segala upacara kehormatan. Ketika menghadap Sultan, kedua tamu ini menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk memeluk agama Islam (meukeumeung meucahdad tamong agama). Setelah masuk secara resmi ke dalam agama Islam, Putri Pahang dikawini oleh Iskandar Muda, sementara saudaranya Raja Raden dikawinkan dengan adik perempuan Sultan Aceh ini. Yang menarik barangkali adalah teks ini menyatakan bahwa perkawinan ini adalah bukti bahwa mereka benar-benar telah memeluk Islam (nyan keuh tanda jih-Iseulam).

Namun, keadaan ini terganggu oleh kedatangan saudara mereka, yang bernama Raja Si-Ujut. Ia adalah panglima Pahang. Kedatangan Si-Ujut disambut dengan upacara kenegaraan. Ia dijamu di Aceh dan bahkan juga diberi daerah kekuasaan, yaitu Ladong dan Krueng Raya. Setelah sekitar tiga tahun berada di Aceh, Si-Ujut meminta saudaranya, Raja Raden, untuk pulang kembali ke Pahang. Raja Raden menolak, dan hal ini membuat Si-Ujut marah dan akhirnya mengancam untuk membunuh Raja Raden dan menghancurkan seluruh kawasan Aceh. Tindakan Si-Ujut ini dimaafkan oleh Iskandar Muda. Namun, dalam perjalanan pulang ke Pahang Si-Ujut dan rombongannya merampas harta rakyat yang ia temui, membakar Ladong dan Krueng Raya. Bahkan, ia menangkap dan membunuh secara sadis beberapa pelaut Aceh yang ia temui. Marah akan kondisi ini, Iskandar Muda memutuskan untuk menyerang Si-Ujut. Inilah justifikasi jihad yang dilakukan oleh Iskandar Muda.

Di antara poin penting yang dapat diambil dari cerita ini adalah Islam telah demikian melekat pada diri Sultan, sehingga melakukan perkawinan dengan dirinya dan keluarganya bermakna seseorang telah memasuki wilayah Islam. Demikian juga halnya dengan ancaman yang ditunjukkan oleh Raja Si-Ujut terhadap Aceh. Ancaman dan penyerangan terhadap kerajaan bermakna penyerangan terhadap Sultan, dan ini juga bermakna terhadap Islam itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan tradisional yang berbentuk kerajaan, penguasa dan kerajaan dianggap satu dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, penghargaan terhadap penguasa berarti juga penghargaan terhadap kerajaan dan Islam, demikian juga sebaliknya. Maksun (2016:125-130)

Simpulan

Sikap nasionalisme dan toleransi atas nama Islam ini masih ada di Aceh. Atau dengan kata lain, Islam masih menjadi "unsur perekat" (binding element) antara sesama Muslim dalam pandangan masyarakat Aceh dewasa ini. Hal ini perlu diangkat untuk mengetahui dengan sesungguhnya tingkat penghayatan ke-Islaman masyarakat dewasa ini. Barangkali tidak salah ketika dipahami bahwa pemberian kesempatan untuk tujuan memberlakukan syariat Islam di Aceh sangat tepat dalam melahirkan sikap nasionalisme. Syariat Islam diharapkan dapat membantu meredam konflik di negeri serambi Mekah ini. Aceh mendapat kesempatan melaksanakan syariat secara formal, yang dideklarasikan secara resmi oleh presiden Republik Indonesia ketika itu, Abdurrahman Wahid, pada tanggal 19 Desember 2000 di mesjid raya Baiturrahman. Dan melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, merupakan gendang penerapan syariat Islam secara kaffah di bumi yang bersyariat, gendang ini ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara kaffah (Zarkasyi, 2008:104). Sungguh menakjubkan bahwa tanpa ada upaya yang besar dan susah payah seperti yang pernah dilakukan oleh Tgk. Daud Beureu'eh dan kawan-kawan sebelumnya Aceh diberikan izin untuk melaksanakan syariat Islam. Dari perspektif konflik, ini barangkali dapat dipahami bahwa ketika "Islam" telah menjadi dasar dan pedoman resmi daerah ini dalam melaksanakan kehidupannya, maka diharapkan tindakan saling membunuh sesama Muslim akan hilang, dan dengan demikian akan terwujud sebuah kondisi di mana sikap nasionalisme muncul ke permukaan, tanpa melihat latar belakang etnik dan suku bangsa. Dengan kata lain, Islam diharapkan akan kembali menjadi "perekat Nasionalisme" yang dapat mempersatukan kaum Muslimin di negeri ini. hal ini yang pernah terjadi dalam sejarah Aceh

Referensi

- Boisard, M. A. (1979). *Humanisme Dalam Islam*. Terjemahan oleh M. Rasjidi. 1980. Jakarta: Bulan Bintang.
- Burhan, A.S. dan Muhammad, A. (2001). *Demokratisasi dan Demiliterisasi: Wacana dan Pergulatan di Pesantren*. Jakarta: P3M.

Dault, A. (2005). *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Miza..

Maksum, H (2016) Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dan pemerhati PKn, Yogyakarta. Deepublish Budi Utama.

Maududi, A. Tanpa Tahun. *Islam Kaffah: Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidup*. Terjemahan oleh Muhammad Humaidi. 2004. Jogjakarta: Cahaya Hikmah